

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abd Thalib, dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Atik Catur Budiati, *Sosiologi Konsektual*, CV. Mediatama, Jakarta, 2009.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaadmadja dan Arief B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1991.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syiah'Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. Jurnal

- Agam Ridho Abrori, dan Edy Lisdiyono, "Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb)", *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Agustina Dewi Putri, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3, No. 1, 2019.
- Aulil Amri, "Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri (Analisa Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/MS.Bna)", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014.
- Cynthia Bella Permatasari, "Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepajen Nomor 103/Pdt.G/2020/PN.KPN)", *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Dermina Dsalimunthe, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.3, No. 1, 2017.
- Dewi Sartika Utami, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/PN.MTR Mengenai Hibah)", *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2,

2016.

- Dwi Anindya Harimurti, "Perbandinga Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2021.
- Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", Vol. 28, No. 01, 2013.
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata", *De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2016.
- Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.
- Hijriyana Safithri, "Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol.1, No. 2, 2020.
- Israviza Notaria, Liza Priandhini, dan R. Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitime Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017", *Indonesian Notary*, Vol. 2, 2020.
- Muchamad Diaz Khoirullah, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Nur Hidayah, "Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No.436/Pdt.G/2009/PA.Mks)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Okta Ainita dan Davina Fevian Bilantiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Ricky Dwiyadi, Annalisa Yahanan, Kms. Abdullah Hamid, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)", *al-Mizan*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Sholihan, dkk, "Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) Melalui Akta Hibah Terhadap Pihak Lain", *Humanis*, Vol. 16, No. 1, 2024.
- Siti Khurfatul Jannah dan Destri Budi Nugrahen, "Pertimbangan Hakim Memutus Akta Hibah Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009–2017)”, *Istinbath*, Vol. 18, No. 2, 2021.

Via Nurita Dolok Saribu, “Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata”, *MABIS*, Vol. 14, No. 1, 2023.

Wahyu Azikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Meraja Journal*, Vol. 1, No. 3, 2018.

Wildan Syukri, dan Edi Purwanto, “Akibat Hukum Hibah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, Vol. 9, No. 1, 2024.

C. Tesis/Disertasi

Afif Fakhri, 2020, “*Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Sengketa Waris (Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)*”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang.

Devi Kumala, 2015, “*Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan P.A Statbat Nomor 207/Pdt.G/2013/P.A.Statbat)*”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Duma Natalia D. Saragi, 2012, “*Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah Oleh Pejabat Umum Yang Berwenang (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850K/PDT/2011)*”, Tesis Universitas Indonesia, Depok.

Kharisman Koima Batubara, 2020, “*Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap (Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor : 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn)*”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.